

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILKADES TAHUN 2013
(Penelitian Di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)**

Oleh:

Iwan Nuryanto (D2B008036)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Village elections for villagers is an important vehicle for them, because their fate is determined ahead of their chosen leader directly. Therefore, the villagers always expect the leader or head of the village who can lead well for the future. Political participation of the community is vital in a democracy. In the broad sense of political participation is citizen involvement in all stages of the policy, ranging from the time of making a decision until the assessment decisions, including the opportunity to participate in the implementation of the decision.

The research method used in this study the quantitative research method is a systematic scientific research on the parts and phenomena and their relationships, which aims to develop and use mathematical models, theories, and hypotheses are mutually linked.

In Batusari Village Head Election 2013, the participation of rural communities Batusari very high. This is not out of any money that is used as a political motivation in choosing the head of the village community. Political money itself has become a cultural village Batusari. Culture of money politics can not be separated from poverty, mentality, and culture of the village head is seen sorting event in getting the additional money. This suggests that the influence of money politics.

Batusari rural community participation in Pilkades in 2013 Based on the study the majority of people make their choice by measuring the amount of value for money provided by the village head candidate. Not seeing the vision, mission and capabilities of the prospective head of the village. Of what is happening in the village Batusari Pilkades implementation in 2013 could be argued that the politics of education received by today's society is still lacking, especially for those in the middle to lower economic level. Political education from an early age is also intended to form the next generation intelligent in politics.

Keywords: Public Participation, Village Head Election, Political Money

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pemilihan kepala desa sendiri sudah ada sejak negara ini merdeka, namun baru diatur dalam undang-undang pada masa orde baru tepatnya pada tahun 1979. Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala desa pada waktu itu adalah UU no 5 tahun 1979, undang-undang ini kemudian diganti setelah rezim orde baru berhasil digulingkan. Undang-undang no 5 tahun 1979 diganti karena alasan mengandung nafas orde baru yang tidak sesuai dengan reformasi saat itu. Undang-undang yang menggantikan adalah uu no 22 tahun 1999. Namun pada akhirnya uu no 22 tahun 1999 kemudian disempurnakan ke dalam uu no 32 tahun 2004 yang sampai sekarang masih berlaku.

Pemilihan kepala desa bagi penduduk desa adalah sebuah wahana penting bagi mereka, karena nasib mereka kedepan ditentukan dari pemimpin yang mereka pilih secara langsung. Oleh karena itu masyarakat desa selalu mengharapkan pemimpin atau kepala desa yang bisa memimpin dengan baik untuk kedepannya.

Partisipasi politik masyarakat merupakan faktor penting dalam sebuah negara demokrasi. Secara etimologis, partisipasi berasal dari *pars* yang artinya bagian dan *capere*, yang artinya mengambil, sehingga diartikan “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation*

berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Dengan demikian partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara. Dan secara etimologis, kata politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warganegara, *politeia* yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara dan politikus yang berarti kewarganegaraan. Dengan demikian kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan dengan unsur-unsur: negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*). Jadi, partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat di dalam pemilihan kepala desa. Pemilihan desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak ini mempunyai alasan yang cukup menarik. Karena pada pemilihan Bupati Demak tahun 2011 yang lalu desa ini tercatat memiliki jumlah pemilih yang paling banyak dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Mranggen yaitu sebanyak 20.606 pemilih. Namun di dalam kenyataannya tingkat partisipasi pemilih di sana hanya 58,24 persen terendah kedua di Kecamatan Mranggen. Dengan

tingkat partisipasi yang rendah seperti di atas masih banyak orang yang ingin menjadi kepala desa di Desa Batusari ini. Setidaknya ada 5 orang yang mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa di Batusari. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkadaes Tahun 2013 (Penelitian di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)”.

II. LANDASAN TEORI

a. Pemilihan Kepala Desa

Kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Di samping itu kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan (Unang Sunardjo,2004: 197).

Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa, hal ini telah berlangsung dari jaman penjajahan Belanda hingga sekarang. Model pemilihan kepala desa yang paling sederhana pada jaman penjajahan Belanda adalah dengan cara masing-masing pemilih dan pendukung calon kepala desa membuat barisan adu panjang ditengah lapangan, sehingga memunculkan pendukung inti yang namanya GAPIT /nama lainnya, yang pada saat ini dikenal dengan tim sukses masing-masing kandidat kepala

desa. Calon kepala desa terpilih adalah yang barisan pemilih/pendukungnya paling panjang. Model pemilihan seperti ini rawan sekali adanya konflik horisontal secara terbuka antara pendukung calon yang satu dengan calon lainnya.

Dalam perkembangan selanjutnya untuk mencegah adanya konflik terbuka antar pendukung maka model pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan pemilihan langsung secara tertutup. Pemungutan suara dilaksanakan dengan menggunakan lidi (bahasa jawa = *biting*) yang diberi tanda khusus oleh panitia kemudian dimasukkan di dalam "bambung" yang diletakkan di dalam bilik tertutup. Bambung adalah sepotong batang bambu yang dilubangi untuk memasukkan lidi. Jumlah "bambung" disesuaikan dengan jumlah calon yang ada. Masing-masing bambung ditandai dengan simbol berupa hasil bumi atau palawija. Misalnya calon kepala desa si "A" menggunakan simbol "Jagung", calon si "B" menggunakan simbol "Padi" dan seterusnya. Setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya menerima satu "biting"/lidi dan dibawa masuk ke dalam bilik tertutup. Di dalam bilik pemilih tadi memasukkan lidi kedalam "bambung" sesuai pilihannya, misalnya memilih si A maka pemilih akan memasukkan lidi kedalam "bambung" bergambar jagung.

Hasil pemungutan suara dihitung berdasarkan jumlah lidi pada masing-masing "bambung" tadi. Jika terdapat calon tunggal maka ada 2 bambung di dalam bilik pemungutan suara yaitu bambung dengan simbol calon kepala desa yang ada dan satu bambung lagi tanpa simbol apapun

yang disebut "bumbung kosong". Jika hasil penghitungan lidi dari bumbung kosong jumlahnya lebih banyak berarti calon tunggal tadi kalah dengan bumbung kosong dan dia dinyatakan tidak terpilih.

Periode berikutnya setelah Indonesia merdeka pemilihan kepala desa sudah mengalami peningkatan yaitu dengan menggunakan pemilihan tertutup dalam bilik suara dengan menggunakan kartu suara. Karena pada saat itu belum banyak orang yang bisa membaca alias masih banyak orang yang buta huruf maka kartu suara tidak bertuliskan nama tetapi menggunakan gambar hasil bumi atau palawija. Sama seperti pada model sebelumnya gambar yang digunakan adalah gambar hasil bumi/palawija. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya menerima satu lembar kartu suara kemudian membawanya kedalam bilik tertutup dan mencoblos gambar salah satu calon yang dikehendakinya. Hasil penghitungan suara, calon yang mendapat suara terbanyak itulah yang terpilih sebagai kepala desa.

Di era reformasi sekarang ini, model pemilihan kepala desa mengalami perkembangan yaitu menggunakan kartu suara berisi foto dan nama calon. Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya harus mencoblos gambar/foto calon yang dipilihnya. Hasil penghitungan suara masih sama dengan cara sebelumnya yaitu calon yang memperoleh suara terbanyak itulah pemenangnya (Ramlan Subakti).

b. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (Miriam Budiardjo, 2007: 169).

Martin Harrop dan William Miller berpendapat bahwa pendekatan perilaku pemilih dalam ilmu politik terbagi ke dalam tiga garis besar pendekatan/model. *Pertama*, pendekatan yang sangat psikologis yang disebut identifikasi partai (*party identification*). *Kedua*, pendekatan yang menganggap individu memiliki kapasitas rasional untuk menentukan pilihan-pilihannya (*rational choice*). Pemilih dianggap memahami, mengapa ia memilih, apa dampak dari pilihannya itu dan ia sadar betul pilihan yang diambil adalah instrumen penting bagi artikulasi kepentingan politiknya. Lalu pendekatan yang *ketiga*, adalah pendekatan secara sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan ini melihat pentingnya basis sosial dalam menentukan perilaku memilih. Misalkan, identitas sosial seperti agama, kelas sosial, dan suku bangsa menjadi alasan utama seseorang memilih sebuah partai atau seorang kandidat. (Budi Suryadi, 2007: 146).

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang *valid* dan *reliable*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya, yang bertujuan untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan hipotesis yang dikaitkan. (Faisal Sanafiah, 1990: 61)

Sampel penelitian adalah sebagian dari penduduk desa Batusari yang minimal berumur 17 tahun atau sudah menikah. Untuk mengetahui sampel yang dianggap representatif untuk dijadikan responden, maka digunakan rumus Frank Lynch. Berdasarkan besarnya sampel yang diambil perhitungan rumus Frank Lynch, maka jumlah sampel yang akan digunakan menjadi responden penelitian adalah 100 jiwa. Sampel diambil dari 5 dusun yang ada di desa Batusari dengan teknik proportional random sampling.(Erwan Agus dan Dyah Ratih, 2007: 37)

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1. DESKRIPSI DESA BATURSARI

Desa Batusari masuk wilayah kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Secara geografis desa Batusari berada di wilayah barat daya kabupaten Demak yang berbatasan langsung dengan kota Semarang dan ibukota Jawa Tengah, sehingga desa Batusari adalah penopang kepadatan penduduk dari kota Semarang. Luas wilayah desa Batusari adalah 651 963 hektar dan desa terluas yang berada di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Luas wilayah desa juga meliputi tanah kas desa sebesar 15,75 ha, bengkok perangkat desa 46,125 ha, kompleks balai desa 0,075 ha, tanah kuburan 0,250 ha, tanah lapangan 0,820 ha, sawah masyarakat 11,960 ha, tegalan 60 ha, pekarangan penduduk 36,106 ha, tanah wakaf DII 0,120 ha, tanah disbun/provinsi 34,23 ha. Desa Batusari yang kondisi letak desanya sebagian besar kontur tanahnya adalah tanah datar, dan secara umum menurut penggunaannya di dominasi oleh perumahan dan sebagian kecil di digunakan untuk pertanian, irigasi hanya sebagian kecil menopang persawahan di wilayah Pucanggading. Tidak banyak sumber daya alam yang potensial yang dimiliki oleh desa Batusari. Persawahan di desa Batusari hanya 20 persen dari luas desa yang mencapai 651 963 hektar lebih.

Secara administratif desa Batusari terdiri atas 5 dusun yang mencakup 297 RT dan 38 RW, berikut data perangkat desa Batusari. Jumlah penduduk desa Batusari mencapai 33 318 jiwa dan dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 21 681 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 18 940 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 19

547 jiwa. Masyarakat desa Batusari mayoritas beragama Islam, yaitu mencapai 72 persen, Kristen Protestan sebanyak 11 persen dan sisanya sebanyak 17 persen masyarakat lagi terbagi dalam agama Kristen Katholik, Hindu dan Budha. Wilayah desa Batusari juga dikenal sebagai wilayah hijau, atau julukan lain dari kawasan yang didominasi kelompok warga yang beragama Islam.

2. GAMBARAN UMUM PEMILIHAN KEPALA DESA BATURSARI TAHUN 2013

Dalam pemilihan kepala desa yang terjadi pada tahun 2013 kemarin. Antusias masyarakat desa Batusari pada pemilihan kepala desa tahun 2013 kemarin cukup tinggi. Dari total suara pemilih yang tercatat sebanyak 14 909 orang. Jumlah suara yang sah sebanyak 14 554 suara sedang yang tidak sah hanya sebanyak 355 suara. Tingkat partisipasi masyarakat desa Batusari yang membaik dalam pemilihan kepala desa tahun 2013 kemarin karena berhubungan budaya politik dan meningkatnya kesadaran politik masyarakat.

BAB III

PEMBAHASAN

Dalam Pemilihan kepala desa Batusari pada tahun 2013, partisipasi masyarakat dalam memilih sangat tinggi. Hal ini terjadi karena adanya dorongan politik uang yang diberikan oleh para calon kepala desa. Visi, misi, kapabilitas dari calon kepala desa hanya dijadikan masyarakat sebagai bahan pertimbangan belaka. Jumlah uang yang mereka terima dari calon kepala desa yang akan menentukan pilihan mereka. Masalah ini terjadi akibat dari budaya politik uang yang ada didalam pemilihan kepala desa. Masih rendahnya pendidikan politik yang masyarakat juga menjadikan politik uang ini meraja lela. Masyarakat menganggap dalam pemilihan kepala desa adalah ajang untuk mendapatkan uang tambahan. Masyarakat juga masih beranggapan bahwa siapapun pemimpinnya tidak akan berimbas apapun kepada mereka secara pribadi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil adalah :

1. Kampanye

Pada saat kampanye ini masyarakat desa Batusari cenderung aktif didalamnya. Hal ini tidak luput dari adanya uang pengganti yang mereka dapatkan dari calon kepala desa yang mereka dukung.

2. Motivasi memberikan suara dalam Pilkades

Motivasi dalam memberikan suara masyarakat desa Batusari hanya sebatas sebagai bentuk partisipasi saja. Mereka cenderung kurang memikirkan pemerintahan desa seperti apa yang akan mereka hadapi ketika mereka salah dalam memilih kepala desa. Karena menurut mereka kurang penting siapa yang akan memimpin mereka, karena hal itu dinilai tidak akan berpengaruh dalam kehidupan pribadi mereka. Yang terpenting di sini mereka memberikan suara dan mendapatkan uang dari calon yang mereka pilih.

3. Bentuk Politik Uang

Bentuk politik uang dalam pemilihan kepala desa Batusari tahun 2013 dalam bentuk uang yang merupakan suatu bentuk yang lazim. Dilihat dari jumlah nominal dari masa kampanye hingga saat hari pemilihan tiba sangat bervariasi. Nominal yang beredar cukup tinggi mulai dari Rp, 50.000,- hingga Rp. 100.000,-.

4. Pengaruh Politik Uang

Politik uang yang masih menjadi budaya dalam pemilihan kepala desa Batusari menjadi salah satu faktor tingginya minat masyarakat dalam memberikan hak suaranya. Hal itu menjadikan partisipasi masyarakat sangat tinggi, siapa yang memberikan uang yang paling banyak maka itulah yang akan dipilih oleh masyarakat.

Pemilih di Desa Batusari dapat dikategorikan sebagai pemilih yang rasional. Karena pemilih yang menghitung untung dan rugi dari tindakan

yang dilakukannya. Menguntungkan bila dianggap ongkos ya dikeluarkan untuk mendapatkan hasil dari tindakan tersebut lebih rendah dari hasil itu sendiri. Sedangkan dianggap rugi apabila ongkos untuk mendapatkan hasil itu lebih tinggi nilainya dari hasil yang diperolehnya.

BAB IV

1. KESIMPULAN

Keputusan untuk tidak memilih atau menjatuhkan pilihan dalam pelaksanaan Pilkades di Batusari 2013, ternyata memperlihatkan beberapa fenomena yang menarik dan variatif. Seorang pemilih bersikap memilih dengan cara menghadiri bilik suara atau TPS pada waktu yang telah ditentukan (jadwal pencoblosan), namun demikian faktor mengapa pemilih menjatuhkan pilihannya kepada salah satu kandidat kades, bukan semata karena pengaruh visi dan misi yang diusung kandidat, namun bukan semata karena pengalaman dan ketokohan (kapasitas kepemimpinan yang dimiliki), akan tetapi juga dipengaruhi oleh besar kecilnya politik yang diterima masyarakat sebagai pemilih, dibandingkan dengan besar kecilnya politik uang yang diberikan kandidat lainnya kepadanya.

Sikap untuk memilih (*to-vote*) kandidat menjadi semakin rumit untuk dijelaskan, karena indikasi semakin praktisnya masyarakat pemilih dalam menentukan pilihannya. Adapun salah satunya adalah dengan tetap menerima politik uang dari salah satu kandidat, namun bukan untuk menjatuhkan pilihan kepada kandidat yang dimaksud. Bentuk penolakan

halus atau dalam bahasa akademis dapat dikatakan sebagai perilaku hipokrisi ini adalah bentuk pendistorsian demokrasi sebagai bentuk dari, oleh dan untuk rakyat dalam menentukan pemimpin masa depan yang mengelola desanya.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui :

a) Faktor pendorong masyarakat desa Batusari dalam menentukan pilihannya di dalam Pilkades tahun 2013 bukan hanya visi dan misi dari calon kepala desa semata melainkan juga dari jumlah uang yang diberikan oleh calon kepala desa. Sejumlah 36 persen responden menyatakan bahwa visi dan misi dari calon kepala desa mempengaruhi pilihannya. Sedangkan 58,12 persen responden menyatakan bahwa uang yang mereka terima dari calon kepala desa mempengaruhi pilihan mereka dalam menentukan calon kepala desa.

b) Fenomena ini memberikan petunjuk bahwa pelaksanaan Pilkades di Batusari tahun 2013 sebagian dapat diidentikkan dengan demokrasi transaksional. Pelaksanaan Pilkades di desa Batusari ini belum dapat memenuhi harapan dari nilai-nilai demokrasi. Karena partisipasi responden masih banyak yang didasarkan oleh faktor uang, bukan demi terpilihnya pemimpin yang akan menjadikan pemerintahan desa yang lebih baik kedepannya.

2. SARAN

Dari apa yang terjadi didalam pelaksanaan Pilkades di desa Batur Sari pada tahun 2013. Dapat dikatakan bahwa pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat saat ini masih kurang, terutama bagi mereka yang termasuk dalam tingkat ekonomi menengah kebawah. Oleh sebab itu pemberian pendidikan politik semenjak usia dini sudah sangat mendesak. Hal ini ditujukan guna membentuk masyarakat yang akan datang agar tidak berpikir selalu pragmatis. Pendidikan politik sejak usia dini juga ditujukan untuk membentuk generasi penerus yang cerdas dalam berpolitik. Karena jika seseorang mempunyai pengetahuan yang benar tentang politik maka hal-hal yang bisa mencederai nilai demokrasi seperti adanya permainan politik uang yang sering terjadi dalam pemilihan kepala desa bisa dihilangkan. Pemerintah diharapkan lebih aktif dalam memberikan kesadaran politik dan menjunjung nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan kepala desa, sehingga pelaksanaan demokrasi dapat berjalan sesuai dengan harapan, dengan terpilihnya seorang pemimpin yang jujur, adil dan pintar mengelola suatu desa demi kemajuan pada desa khususnya dan kemajuan negara pada umumnya.

Daftar Pustaka

Buku:

- Anwar, Arifin. 2006. *Pencitraan dalam politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Held, David. 1991. *Bentuk-Bentuk Demokrasi*. Jakarta: Komunal.
- Held, David. 2004. *Demokrasi dan Tatahan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mariana, Dede. 2008. *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Pradhanawati, Ari dan Tri Cahyo Utomo. 2008. *Pemilu dan Demokrasi*. Semarang: Fisip Undip dan Jalan Mata.
- Roth, Prof. Dieter. 2008. *Studi Pemilu Empiris*. Jakarta: Friedrich Nauman Stifung fur die Freiheit.
- Sanafiah, Faisal. 1990. *Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar dan Aplikasi)*. Malang: Yayasan Asah Asih Asuh.
- Schumpeter, Joseph. 2000. *Kapitalisme, Sosialisme dan Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sorensen, Georg. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunardjo, Unang. 2004. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung : Tarsito

Subakti, Ramlan. 2005. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Kencana Prenada.

Sudirwo, Daeng. 1991. *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Angkasa.

Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Suryadi, Budi. 2007. *Sosiologi Politik*. Jogjakarta: IRCiSoD.

Peraturan Perundang-Undangan:

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pasal 202 Tentang
Desa*

*Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara
Pencalonan,*

*Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara Dan
Pemberhentian Kepala*

Desa.